

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN TONRORITA
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA**

EVY SRIWATI

Nomor Stambuk: 105611128119



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN TONRORITA
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh :

EVY SRIWATI

Nomor Stambuk : 105611128119

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Tonrorita
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Evy sriwati

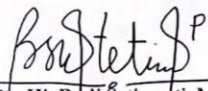
Nomor Induk Mahasiswa : 105611128119

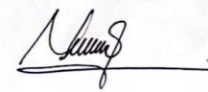
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si


Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP



Mengetahui:

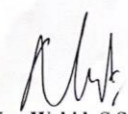
Dekan

ketua Program Studi

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Haniyati Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 99174

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0159/FSP/A.4-II/VII/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, 13 Juli 2023.

Mengetahui :

Ketua

Sekretaris



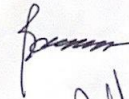
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

Tim Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

()

2. Dr. Hafis Elfiansyah P, M.Si

()

3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

()

4. Riska Sari, S.Sos., M.AP

()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Evy Sriwati

Nomor Induk Mahasiswa : 105611128119

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2023



Evy sriwati

ABSTRAK

Evy sriwati. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Hj.Budi Setiawati dan Nurbiah Tahir)

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di daerah. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tekkhnik pengumpulan data melalui pbservasi wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah kelurahan tonrorita sudah memenuhi pedoman RPJM. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam hal kelurahan dalam melakukan pembangunan jalan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Namun berdasarkan hasil penelitian masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik, seperti kurangnya sumberdaya manusia.

Kata kunci : *Peran Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur Jalan*

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa”*. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada jenjang perkuliahan strata 1 jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya semangat, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda H. Musa dan ibunda HJ. Rostina, S.Pd. yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran membesarkan, mendidik, dan selalu mendoakan penulis dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga.
2. Ibu Dr.Hj.Budi Setiawati,.M.Si selaku pembimbing I dan ibu Nurbiah Tahir,S.Sos., M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Kepada Bapak Prof. Dr .H.Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos.,M,Si selaku Dekan Fakultas Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan kami ilmu pengetahuan selama kuliah, dan seluruh staf yang selaku sabar melayani segala urusan administrasi dan perkuliahan.
7. Seluruh pegawai kantor kelurahan Tonrorita yang telah banyak memberi bantuannya kepada penulis selama proses penelitian.
8. Kepada masyarakat kelurahan Tonrorita yang telah berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada penulis.
9. Kepada kakak perempuan saya Evisriani, S.Kep.,Ns yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada saudari Srikamalia, S.Farm, Nursyamsiani dan saudara Adnan harier hisyam yang telah banyak memberikan bantuan dan support kepada penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Arisma melailandi, Nurhalisa Saenal, dan Suhartina Waris yang selalu mensupport dan menolong satu sama lain demi keberhasilan Bersama.

12. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 terkhusus kelas G yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

13. Teman-teman KKP Fisip Unismuh Makassar Angkatan 25 2022 (Pangkep) selalu mensupport dan memberikan semangat satu sama lain dan semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Billahi fii sabilil Haq, fastabiqul khairat, wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 26 juni 2023

Evy sriwati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Teori dan Konsep	10
1. Konsep Peranan	10
2. Konsep Pemerintahan	13
3. Konsep Peran Pemerintah.....	15
4. Konsep Pembangunan	18
5. Konsep Infrastruktur Jalan	21
6. Konsep Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	23
C. Kerangka Pikir.....	30

D. Fokus penelitian	31
E. Deskripsi fokus.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis	35
G. Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa	45
C. Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Yang Relevan	7
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	34
Tabel 4.1 Dusun kelurahan tonrorita.....	42
Tabel 4.2 Sarana Pendidikan Di Kelurahan Tonrorita	43
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Kel.Tonrorita	44
Tabel 4.4 Rencana Program Pembangunan Kelurahan Tonrorita.....	48
Tabel 4.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	49
Tabel 4.6 Hambatan dan solusi Dalam proses perencanaan.....	54
Tabel 4.7 Hambatan dan solusi Dalam Proses Pelaksanaan.....	64
Tabel 4.8Hambatan dan solusi Dalam Proses Pengawasan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Peta administrasi kabupaten Gowa	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Tonrorita.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Salah satunya adalah peningkatan pelayanan transportasi darat berupa pembangunan jalan.

Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di daerah. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung maupun tidak berlangsung pembangunan jalan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Di Indonesia, penyelenggaraan pembanguan dan pemelihara jalan terbagi atas tiga kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provensi/kota berwenang dalam penyelenggaran jalan provensi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur jalan.

Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang undangan jalan; pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan; pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengopesaian dan pemeliharaan jalan, sedangkan pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengembangan jalan.

Pembangunan infrastruktur adalah bagian terpenting khalayak umum. Sesuai dengan pasal 78 ayat 1 dan 2 UUD No. 4 tahun 2014 menjelaskan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan insfrastruktur desa/kelurahan ditentukan oleh kebijakan di tingkat provensi, kabupaten dan desa/kelurahan.

Infrastruktur pada dasarnya membangun aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan masyarakat. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi. Infrastruktur merupakan sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan

kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan masyarakat maupun dalam kehidupan berkeluarga. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mutlak didalam masyarakat. Jalan memiliki peranan yang strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, sehingga harus dipertahankan fungsinya dengan baik melalui sistem pemeliharaan yang baik pula. Semakin baik infrastruktur jalannya maka pertumbuhan ekonomi juga semakin cepat, akan tetapi jika infrastruktur jalanan rusak maka pertumbuhan ekonomi juga lambat. Karena proses transportasi antar kota maupun kabupaten lambat disebabkan infrastruktur jalan yang rusak. Oleh sebab itu peran pemerintah serta partisipasi masyarakat sangat berpengaruh didalamnya.

Kelurahan Tonrorita salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa. Untuk status klasifikasi jalan adalah jalan nasional sebab menghubungkan antar Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto. Jika dilihat dari perkembangan infrastruktur jalan semestinya jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita menjadi akses jalan prioritas yang merupakan penghubung antara Kelurahan Tonrorita dengan akses menuju ibu kota Kabupaten dan Provinsi sehingga menjadi wewenang pemerintah kabupaten untuk memperbaiki infrastruktur jalanan. Dengan status jalan penghubung Kabupaten, masyarakat tentunya memerlukan jalan yang baik untuk mengakses antar Kabupaten, baik bersekolah, ke rumah sakit maupun mempermudah akses perekonomian masyarakat disekitarnya.

Namun berdasarkan observasi awal di Kelurahan Tonrorita pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita cukup memprihatikan, jika melalui jalan sekitar Kelurahan Tonrorita, maka terlihat adanya kerusakan disepanjang jalan berlubang, berlumpur, becek, dan bahkan ada beberapa yang mengalami kecelakaan karena kerusakan parah jalan. Masyarakat untuk menunjukkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap pemerintah maka masyarakat menanam pohon pisang ditengah jalan sebagai bentuk protes kepada pemerintah dan caleg-caleg yang setiap tahun ada pengukuran jalan namun belum terselesaikan sampai saat ini.

Melihat kondisi jalanan tentunya peran pemerintah kelurahan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dimana kepala kelurahan mempunyai tugas pokok memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Dengan melakukan perencanaan yang di maksud disini yaitu merencanakan pembangunan atau pemeliharaan jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita, lalu perencanaan tersebut di realisasikan dengan mengadakan pembangunan maupun perbaikan jalan, lalu dilakukan pengawasan terhadap pembangunan maupun perbaikan jalan, lalu dilakukan pengawasan terhadap pembangunan atau perbaikan jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita.

Peneliti sendiri melakukan penelitian di Kelurahan Tonrorita sebab merupakan daerah kelahiran peneliti. Disamping itu selama ini pembangunan jalan ataupun perbaikan jalan di Kelurahan Tonrorita hanya 1 kali terealisasi. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan

penelitian ini yaitu fokusnya penelitian pada 3 aspek yaitu pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas, pembangunan harus menekankan pada pemerataan dan pembangunan menekankan pada pertembuhan untuk terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Tonrorita.

Dari uraian masalah tentang permasalahan kondisi jalanan, penulis kemudian tertarik mengadakan penelitian secara mendalam mengenai “peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah, yaitu:

Bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian, yaitu:

Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga pemerintah dalam upaya mengatasi masalah-masalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di masa yang akan datang.

2. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diberikan manfaat bagi ilmuan yang mengkaji masalah, khususnya pengetahuan tentang strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan mendapatkan bahan perbandingan atau acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: penelitian terdahulu bertujuan mendapatkan bahan perbandingan atau acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Yang Relevan

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sadikin, Sjaib Hannan, dan Ulya Sunani (2021)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumandia	Berdasarkan penelitian yang dilakukakan peneliti bahwa pemerintah Kecamatan Ulumandia telah menjalankan perannya berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Ini berdasarkan peran Dinas Pekerjaan Umum dalam

			<p>melakukan pembangunan jalan yang juga disesuaikan dengan kerja pembangunan daerah (RKPD) dan adanya kordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga pembamgunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran</p>
2.	<p>Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, Risa Salsabila, & Yohana Manulang (2021)</p>	<p>Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran tersebut. Macetnya suatu pembangunan desa disebabkan pemerintah</p>

			<p>desa belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.</p>
3.	Yoga Hariyanto, Shulis, Figur Adhiyakan (2021)	Peranan pemerintah desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	<p>Dari penelitian yang telah dilakukan ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa Kalimas telah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan, pengadaan fasilitas pemadam kebakaran, poskamling dan mobil</p>

			<p>ambulance. Akan tetapi sejak pandemic covid-19 mewabah di Indonesia, pembangunan infrastruktur di desa Kalimas menjadi terhambat karena Dana Desa (DD) di ahli fungsikan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19.</p>
--	--	--	--

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Peranan

Secara etimologis kata peranan berdasarkan dari kata peran yang artinya “pemain sandiwara, tukang lawak”. Kata peran “peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (poewadarminta 1985 : 735). Dengan demikian kata peranan berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berarti dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbukannya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002 : 268-269).

Menurut Soerjono (2002 : 441), unsur-unsur peranan atau role adalah :

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Sementara peran itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono soekanto,2002 : 246).

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai Hasrat untuk melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-

peluang yang seimbang, bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. (soerjono soekarto, 2002 : 247)

Menurut Komaruddin (1994 : 768), yang dimaksud peranan yaitu:

- a. Bagian dari tugas utama yang dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi dalam setiap variabel dalam hubungan.

Jadi peran menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan Ketika mendapatkan akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”. Didalam kata dasar “perintah” ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu:

1. Ada dua pihak yang terlibat
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah

3. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (syafie, 2011:5).

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut poerwadarmita (2006:141) sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu negara (daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintahkan suatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah)
- c. Pemerintahan adalah manajemen tata Kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga yang sederajat yang terkait guna tujuan Negara itu sendiri.

Menurut Natipula (2012) istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang dimaksud menyeluruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah pelaksana penguasaan negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat.

3. Konsep Peran Pemerintah

Menurut Dahlan (Akib & Teparé, 2017) Peranan berasal dari kata peran. Peran mempunyai arti perilaku atau pemain atau bertindak. Sedangkan pembangunan menurut Siagian (2000:15) adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa (*Nation Building*). Maka dapat diartikan peran pemerintah adalah usaha pertumbuhan pemerintah dalam bertindak untuk membuat perubahan yang terencana demi terwujudnya pembangunan.

Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P.Siagian dalam bukunya administrasi pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengataran, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi ketertiban umum dan keamanan.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokeroamidjojo, 1988; 18) dapat dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan bahwa sering kali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang tradisional

2. Kemudian timbul pengertian tentang Service state, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pikiran-pikiran mengenai negara kesejahteraan. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam melaksanakan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai interpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur pendorong pembaharuan atau pembangunan.

Tjokroamidjojo (1988:19) klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima cara:

1. Operasi langsung (operation): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain).
3. Pengendalian tak langsung (indirect Control): dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan

penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk daftar barang tertentu

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.

Menurut Barton (2000) peran utama pemerintah secara garis besar yaitu:

1. Peran alokasi sumber daya

Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relative pemerintah dalam perekonomian dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

2. Peran Regulator

Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat.

3. Peran Kesejahteraan sosial

Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial diNegara yang bersangkutan, perpajakan, pembangunan, jaminan sosial.

Untuk peranan pemerintah dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan (simbolon,2021). Untuk lebihnya jelasnya perhatikan berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses awal dimana pemerintah merencanakan apa yang hendak dibangun. Dalam perencanaan ini pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan masyarakat

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh, sebab pemerintah dikatakan berhasil apabila berhasil dalam mencapai dikerjakan dan hasilnya bagus. Pada pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pemerintah (desa/kelurahan) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

3. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diartikan untuk menghindari penyelewengan anggaran melalui anggaran pemerintah. Pengawasan adalah penilaian hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan.

Dari uraian di atas ditarik kesimpulan peran pemerintah yaitu sebagai pengatur, fungsi, kebijakan disuatu daerah dalam memajukan pertumbuhan maupun ekonomi.

4. Konsep Pembangunan

Peraturan Menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan Desa/Kelurahan disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya Desa/Kelurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa/Kelurahan.

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. “Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna: “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.”

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) unruk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan dan pencapaian pengetahuan

dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran dan perluasan wawasan manusia (Rohman, 2017).

Pembangunan merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bila itu terkait usaha usaha memajukan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, konsep itu lebih banyak dikaitkan dengan kemajuan material atau ekonomi. Namun, saat ini, konsep pembangunan telah mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih bermultidimensi.

Dengan demikian, masalah pembangunan juga harus didekati dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu. Salah satu konsep pembangunan yang sangat populer di Indonesia adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam GBHN 1993, yang mengemukakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Konsep pembangunan ini mengandung arti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau fisik seperti kecukupan pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan, tetapi juga aspek batiniah atau non fisik, seperti pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, dan rasa keadilan.

Dengan demikian, konsep pembangunan sesuai dengan GBHN adalah rangkaian upaya perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sebagai suatu

peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan seperti yang dikemukakan oleh Bryant dan white (Efendi, dkk., 1989), mengandung 3 aspek:

1. Pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas(capacity), kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan untuk itu.
2. Pembangunan harus menekankan pada pemerataan (equity), perhatian yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat akan memecah-belah masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka.
3. pembangunan menekankan pada pertumbuhan. Karena konsep kelangsungan dan kelestarian ini, untuk memajukan dan membangun pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilaksanakan terhadap suatu usaha atau rangkaian yang sangat penting diperhatikan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus serta perencanaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan

5. Konsep Infrastruktur Jalan

Pengertian Infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik

untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Menurut (Kuncoro 2010:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh

pemerintahan dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Beberapa contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah yaitu jalan raya, bandara, stasiun, gorong-gorong, kantor polisi, dan berbagai macam infrastruktur publik lainnya.

Infrastruktur merupakan roda penggerak ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pengembangan pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi macro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of privat capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu berkelanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

6. Konsep Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur menurut Sondang P. Siagian (2005) merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Menurut Grigg (1988) merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Untuk itu peran pemerintah dalam pembangunan jalanan sangat berpengaruh besar terhadap mobilitas dan distribusi barang, jasa, maupun penumpang baik di kota-kota besar maupun pedesaan. Permasalahan jalan untuk setiap daerah pasti ada, seperti keadaan jalan di Kelurahan Tonrorita.

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2, bahwa pembangunan infrastruktur mencakup :

1. Prasarana dan sarana perhubungan : jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyebrangan sungai dan danau;
2. Prasarana dan sarana perairan : bendungan, jaringan pengairan, bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan bangunan pembangkit listrik tenaga air;
3. Prasarana dan sarana permukiman, industry dan perdagangan : bangunan Gedung, Kawasan industry dan perdagangan, Kawasan perumahan skala besar, reklamasi lahan, jaringan dan instalasi air bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem drainase;

4. Bangunan dan jaringan utilitas umum : gas, listrik dan telekomunikasi.

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Infrastruktur jalan adalah kebutuhan mutlak dalam sistem angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi.

Dilihat dari kewenangannya, infrastruktur jalan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Jalan Nasional

Merupakan jalan arteri atau jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer. Jalan ini menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaan jalan nasional berada pada pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum). Jalan nasional ini melayani kepentingan nasional atas dasar strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas

regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

b. Jalan Provinsi

Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

c. Jalan Kabupaten/Kota

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten/kota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten/kota, dan jalan strategis kabupaten/kota. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan rel.

Penyebab Kerusakan Jalan merupakan masalah penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota saat ini banyak mengalami

kendala, baik kendala yang bersifat teknis maupun kendala yang bersifat kelembagaan. Menurut Bintoro (1997:16), penyebab kerusakan jalan dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu:

1. Bersifat Teknis

- a. Jalan berlubang yang diakibatkan oleh beban muatan berlebih (overloading) dari angkutan yang membawa beban muatan melebihi kapasitas beban jalan.
- b. Sistem drainase air, yang mengakibatkan perkerasan jalan menjadi lentur dan mudah mengalami keretakan.
- c. Mutu Konstruksi, merupakan mutu bahan atau beban material yang digunakan dalam pembangunan jalan yang tidak memenuhi standar atau kelas jalan yang sesuai dengan kontur wilayah atau lahan

2. Bersifat Kelembagaan

- 1) Perencanaan, merupakan suatu langkah awal dalam kegiatan perbaikan atau pemeliharaan jalan. Perencanaan yang kurang diperhatikan dapat menyebabkan proses pemeliharaan jalan hanya akan mengalami persoalan yang sama dimasa mendatang
- 2) Pemrograman, merupakan suatu tahapan yang akan dilaksanakan dalam pemeliharaan jalan. Program-program yang dijalankan harus memperhatikan kondisi jalan sehingga perbaikan kembali jalan-jalan yang dianggap rusak dapat berjalan sesuai target pembangunan

- 3) Penganggaran, dalam suatu pembangunan infrastruktur terutama pemeliharaan jalan, ketersediaan anggaran harus disesuaikan dengan kontur jalan yang akan diperbaiki. Masalah yang timbul justru ketersediaan dana yang minim dalam pemeliharaan infrastruktur jalan menyebabkan perbaikan jalan dilakukan dengan menggunakan material konstruksi yang tidak sesuai standar dan kelayakan sehingga menyebabkan kerusakan jalan terus terjadi
- 4) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengurus masalah perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Dalam UU No.38/2004 tersebut diatur bahwa penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi:

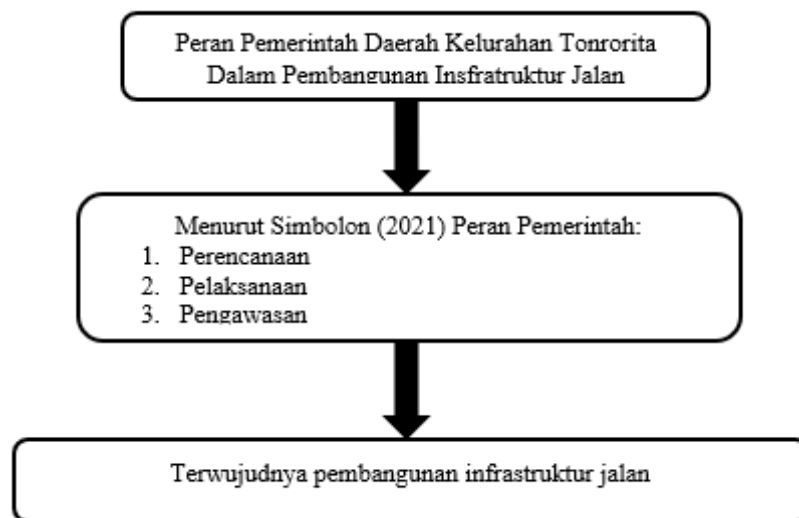
- a. Pengaturan jalan, yakni perumusan kebijakan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan
- b. Pembinaan, yakni kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan
- c. Pembangunan jalan, yakni pemrogaman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan

- d. Pengawasan jalan, yakni kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, Pendidikan dan Kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

C. Kerangka Pikir

Peran pemerintah adalah sebagai pengatur, fungsi kebijakan disuatu daerah dalam memajukan pertumbuhan pembangunan maupun ekonomi. Simbolon (2021) pemerintah memiliki peran dalam pembangunan ada tiga yaitu: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus penelitian

Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian. Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Tonrorita Kabupaten Gowa.

E. Deskripsi fokus

Berdasarkan fokus penelitian, maka dikemukakan deskripsi fokus penelitian yaitu:

1. Perencanaan adalah suatu proses awal dimana pemerintah merencanakan apa yang hendak dibangun. Perencanaan pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan Badan bermusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Pembangunan kelurahan mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah kelurahan pelaksanaan pembangunan kelurahan, pembinaan kemasyarakatan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Adapun rencana atau agenda kepala Lurah Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa saat ini yaitu pembangunan infrastruktur jalan karena sangat minimnya fasilitas jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita.
2. Pelaksanaan adalah pemerintah mengimplementasikan apa yang telah ditetapkan sebelumnya untuk segera direalisasikan. Ketetapan

perencanaan dalam pembangunan adalah mutlak harus di sertai dengan kesabaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung didalam pembangunan. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasi pembangunan, diperlukannya lurah sebagai penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan di mana lurah sebagai kepala kelurahan memegang peranan yang menentukan. Peran kepala lurah Tonrorita dalam proses pelaksanaan pembangunan ini sangat penting karena lurah sebagai pemimpin dikelurahan dan sekaligus penanggung jawab pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang telah di rencanakan sebelumnya.

3. Pengawasan adalah pengawasan terhadap kinerja dari pembangunan insfratraktur jalan untuk penilaian hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan. Pengawasan pembangunan kelurahan menjadi dasar pembahasan musyawarah kelurahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. peran kepala lurah dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan tonrorita kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa kepala Lurah Tonrorita turun tangan langsung kelapangan untuk mengawasi dan mengontrol pekerja sudah sampai mana tingkat kemajuan pembangunan, tingkat penyelesaian dan memeriksa biaya yang sudah di keluarkan apakah sudah sesuai dengan pembangunan. Karena tugas pokok pemerintah dalam halnya kepala lurah berperan sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus pengawas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023. Penelitian ini berlokasi di Kantor Kelurahan Tonrorita terletak di Jalan Poros Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Adapun jenis dan tipe penelitian dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, observasi secara langsung dan dokumentasi.
2. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan melalui observasi untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Menurut S.P Siagian dalam harahap, (2020) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian;

1. Data primer ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan objek penelitian tentang peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa buku, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto yang semuanya berhubungan dengan fokus penelitian.

D. Informan Penelitian

Penelitian mengenai peranan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, informan dipilih secara purposive. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Muslimin kadir, SE	Kepala Lurah Tonrorita
2.	Amiruddin, SE	Sekretaris Lurah Tonrorita
3.	Nurhidaya	Staff
4.	H. Mantang	Tokoh Masyarakat
5.	Sulaiman	Tokoh Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara.

- a. Metode Observasi lapangan Observasi hal ini untuk mengamati data empiris di lapangan serta melakukan pencatatan.
- b. Metode Wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara.
- c. Metode dokumentasi, menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan yang memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis

Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (Manurung 2005), yaitu:

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi, laporan lapangan Sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari Kembali data yang diperoleh apa bila diperlukan.
2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran yang jelas serta. Memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ada ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2017) triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Lebih lanjut Sugiyono, membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga Teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau Teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $1.883,32 \text{ km}^2$ atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana Bahasa yang digunakan di Kabupaten ini adalah Bahasa Makassar dengan suku konjo pengunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Adapun mayoritas penduduk di Kabupaten ini beragama islam. Kabupaten ini berada pada $12^{\circ}38.16'$ Bujur Timur dari Jakarta dan $5^{\circ}33.6'$ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara $12^{\circ}33.19'$ hingga $13^{\circ}15.17'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}5'$ hingga $5^{\circ}34.7'$ Lintang Selatan dari Jakarta.



Gambar 4.1 Peta administrasi kabupaten Gowa

Kabupaten yang berada pada bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Disebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Disebalah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jenepono sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah kabupaten gowa terbagi dalam 18 kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa 27,74% dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Sombu Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan. Sedangkan dataran tinggi sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Adapun Kecamatan Biringbulu dengan luas wilayah 218,84 km^2 memiliki 9 desa yaitu Desa Pencong, Parangloe, Baturappe, Borimasunggu, Berutallasa, Taring, Julukanayya, Lembahloe, Batumalonro dan 2 kelurahan yaitu Kelurahan Lauwa dan Kelurahan Tonrorita.

2. Profil Kelurahan Tonrorita

Tonrorita adalah sebuah Kelurahan di Wilayah Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara administratif Kelurahan Tonrorita merupakan salah satu Kelurahan dari 2 (dua) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Biringbulu.

Kelurahan Tonrorita dulunya adalah bernama Desa Tonrorita, akan tetapi berubah menjadi Kelurahan Tonrorita karena pada tahun 2010 dibawah kepemimpinan H.Matta sebagai kepala Desa pada saat itu kepemimpinannya tidak dapat berjalan dengan baik dan mulus dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dari segi sarana dan prasarana tidak terlalu banyak perubahan kurang lebih 3 tahun masa kepemimpinannya H.Matta.

Oleh sebab itu H.Matta yang belum habis masa periodenya pindah ke Kalimantan. Berpindahnya H.Matta ke Kalimantan menjadikan desa Tonrorita kepemimpinannya di ambil ahli oleh Ibu Khamsinah selaku Camat Biringbulu. Dan kemudian pada tahun 2011 desa Tonrorita menjadi Kelurahan Tonrorita. Yang diamanatkan oleh Syafaruddin Dg. Nyengka sebagai lurah Tonrorita sampai dengan pertengahan tahun 2016. Memasuki awal tahun 2017, Kelurahan Tonrorita di pimpin oleh Sekretaris Lurah, karena lurah yang menjabat sebelumnya diangkat menjadi Sekretaris Camat Biringbulu. Pada pertengahan tahun 2017 Muh Syarif, S.Sos sebagai lurah Tonrorita. Dan pada tahun 2022

kelurahan tonrorita di ambil ahli oleh Muslimin Kadir, SE karena lurah sebelumnya sudah menjadi Sekretaris Camat Birinbulu.

Kelurahan tonrorita yang terletak di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa adalah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak di ujung selatan pulau Sulawesi, jaraknya kurang lebih 117 kilometer dari Makassar ibu kota Provinsi Selatan. Untuk mengetahui tentang letak Kelurahan Tonrorita maka dapat digambarkan melalui batas-batasannya yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pencong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lauwa, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Datara, Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Borimasunggu.

Luas daerah Kelurahan Tonrorita yaitu 20,68 km dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 3661 jiwa, dimana laki-laki sebanyak 1800 dan perempuan sebanyak 1861. Adapun jumlah dusun di Kelurahan Tonrorita sebanyak 10 dusun, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Dusun kelurahan tonrorita

No		Kelurahan	Dusun
1.		Tonrorita	Batuborong
2.			Tumbukung
3.			Borongbulo
4.			Baturaga
5.			Pa'rasangan

No.		Kelurahan	Dusun
6.		Tonrorita	Batueja
7.			Bulogading
8.			Batulompoa
9.			Tom'pona
10.			Tamalluas

Sumber: profil kelurahan

Di Kelurahan Tonrorita juga mempunyai sarana Pendidikan dimana telah kita ketahui bahwa sarana Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan disegala bidang. Selain itu, sarana Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui secara terperinci jumlah dan jenis sarana Pendidikan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan Di Kelurahan Tonrorita

No	Jenis sarana/Pendidikan	Jumlah (buah)
1.	TK	2
2.	SD	4
3.	SMP	1
4.	MTs	1
5.	SMA	-
6.	MA	1
	Jumlah	9

Pada tabel 4:2 di atas menunjukkan bahwa sarana Pendidikan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa tidak cukup memadai karena tidak adanya sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan untuk menempuh study lanjut.

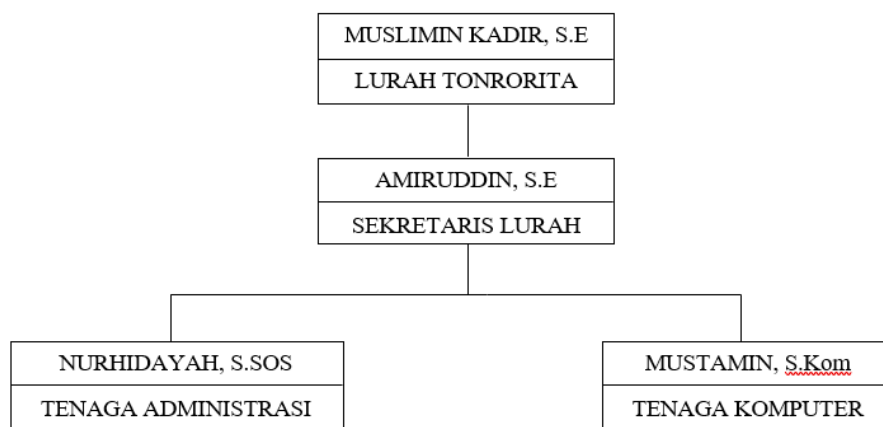
Adapaun sarana dan prasarana fasilitas yang terdapat di kantor Kelurahan tonrorita kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Kel.Tonrorita

No.	Sarana dan prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Meja kerja	6	Baik
2.	Kursi	35	Baik
3.	Printer	1	Baik
4.	Leptop	1	Baik
5.	Komputer	1	Baik
6.	Lemari	1	Baik

Sumber: buku anggaran kelurahan

Berikut ini adalah struktur organisasi kelurahan Tonrorita :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Tonrorita

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

Kepala daerah berperan sebagai alat pemerintah pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak kewenangan dan kewajiban pemerintah Daerah. Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seorang barang kali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan itu sendiri timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (David Berry, 2003:105). Harapan-harapan merupakan

imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan terdapat harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam sebuah kepemimpinan khususnya dalam sebuah daerah, dalam hal ini adalah kepala lurah tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun lurahnya yang mana masyarakat telah diberikan amanah untuk menjadikan daerah tersebut jauh lebih meningkat. sebelumnya, menurut Simbolon (2021) peran dalam pembangunan ada tiga yaitu: Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa/kelurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Kelurahan menyusun perencanaan Pembangunan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah kelurahan didampingi oleh pemerintah Kelurahan didampingi oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengordinasikan pembangunan kelurahan, kepala lurah dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat lurah, atau pihak ketiga. Camat melakukan kordinasi pendampingan diwilayahnya. Pembangunan kelurahan mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah Kelurahan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, pembinaan kemasyarakatan Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Adapun rencana atau agenda dari kepala lurah Tonrorita sendiri selama masa jabatannya pembangunan infrastruktur jalanan merupakan program prioritas kelurahan tersebut dikarenakan sangat minimnya fasilitas jalanan yang ada di Kelurahan Tonrorita sendiri.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan kelurahan dalam kewenangannya pemerintah kelurahan mengimput data infrastruktur jalan kedalam aplikasi SIPD pada usulan musrembang kecamatan. Adapun rencana perbaikan infrastruktur di kelurahan Tonrorita yang diusulkan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Rencana Program Pembangunan Kelurahan Tonrorita

Data Aplikasi SIPD yang diusulkan			
No	Program Kelurahan	Jarak	Keterangan
1	Pengaspalan Perbatasan Lauwa-Lingkungan Baturaga	10 Kilo	2,1 kilometer Terelisasi (2022)
2	Pengusulan Lingkungan Pengaspalan parangan-Lingkungan Tompona		Belum ada Kepastian kapan

Sumber : data aplikasi SIPD

Dari tabel di atas diketahui bahwa rencana program pembangunan Kelurahan Tonrorita terkait usulan pengaspalan jalan terus diupayakan oleh pemerintah kelurahan untuk mendapat pengasalan/perbaikan jalan setiap tahun yang dilakukan dengan memasukkan usulan pada aplikasi sistem Informan Pembangunan Daerah (SIPD). Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yakni kepala lurah dan sekretaris lurah mengatakan bahwa:

“..Dalam mendukung program pembangunan pemerintah, kami selaku pemerintah kelurahan daerah terus berusaha dalam memaksimalkan untuk mendapat pengaspalan/perbaikan jalan dengan melakukan musrembang bersama masyarakat dan pemuda. Adapun usulan yang setiap tahun diusulkan yaitu terkait perbaikan jalan dari Lingkungan pa”rasangan sampai Lingkungan Tompo’na sebab mengingat jalan ini cukup parah dan ini juga jalan akses untuk menuju kabupaten lain maka dari itu setiap tahun kami mengusulkan pada aplikasi SIPD untuk pengaspalan jalan. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin sudah dapat jalan jatah pengaspalan/perbaikan jalan sejauh 2,1 kilometer lingkungan batuborong-lingkungan baturaga, alhamdulillah Namun untuk pengaspalan/perbaikan jalan pada Lingkungan parangan-Lingkungan Tompona sampai saat ini belum terelisasikan sampai saat ini, dan masih menunggu. Namun untuk pengukuran sudah dilakukan akan tetapi Cuma mendapat jatah sampai 6 kilometer yang

artinya pengaspalan nanti dari Lingkungan parasangan sampai Lingkungan Bulogading..”(Wawancara dengan MK,20 mei 2023).”

Dari wawancara diatas ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kelurahan sudah berupaya dengan maksimal untuk mendapatkan jatah pengaspalan/perbaikan jalan dari pemerintah dengan setiap tahun mengusulkan pada aplikasi Sistem Informan Pembangunan Daerah (SIPD), dan tahun 2022 kemarin sudah mendapatkan jatah pengaspalan/erbaikan jalan sepanjang 2,1 kilometer.

Tabel 4.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

No	Program Kelurahan	Jarak	Keterangan
1	Perbaikan Saluran Air (Drainase) Lingkungan Batuborong- Lingkungan Parasangan	2, 1 kilo	Terelisasi (2022)
2	Gotoroyong perbaikan jalan		

Sumber : buku laporan kelurahan

Dari tabel di atas diketahui bahwa program kelurahan Tonrorita dalam perbaikan jalan ada dua yaitu: perbaikan saluran air (drainase) dan gotong royong. Sesuai wawancara Bersama sekretaris lurah:

“..Adapun perbaikan saluran air (Drainase) di programkan oleh pemerintah kelurahan sebagai salah satu metode pembebasan suatu area dari genangan air, sebab jika sudah musim hujan air biasanya tergenang dijalan dan itu membuat jalan licin. Dan gotongroyong Bersama masyarakat dalam memperbaiki jalan berlobang dengan menimbung jalan berlobang tersetiap. Kegiatan gotong royong ini dilakukan 2 kali dalam sebulan..” (Wawancara dengan AM, 29 mei 2023).

Dengan indikator perencanaan pembangunan infrastruktur jalan kelurahan Tonrorita, mengenai penyusunan rencana pembangunan

jangka menengah (RPJM) apakah melibatkan unsur masyarakat atau tidak. Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yakni kepala lurah dan kepala administrasi kelurahan mengatakan bahwa:

“..pastinya dalam rancana pembangunan jangka menengah kami melibatkan semua unsur masyarakat, baik dari masyarakat, aparat keamanan serta tokoh adat kita undang untuk datang mengadakan pertemuan dikantor kelurahan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan..” (Wawancacara dengan MK,20 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam hal itu kepala lurah dalam melakukan perencanaan penyusunan pembangunan selalu melibatkan masyarakat, baik itu tokoh adat serta aparat keamanan.

“..iya dalam pembuatan RPJM selalu melibatkan masyarakat, selalu ada musyawarah bersama dengan seluruh staf dan masyarakat mengenai apa saja kebutuhan yang akan dibutuhkan dalam proses pembangunan..” (Wawancara dengan NH, 20 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) ikut melibatkan staf kelurahan serta tokoh masyarakat dengan melakukan musyawarah bersama demi lancarnya suatu perencanaan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan Bersama masyarakat yaitu H.Mantang (HM) dan Sulaiman (SL) mengatakan bahwa:

“..iyo nak kami biasa diundang datang berdiskusi dengan aparat pemerintah kelurahan mengenai apa saja pembangunan yang akan dilakukan..” (Wawancara dengan SL, 24 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut serta dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan diperbolehkan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kelurahan.

“..iyo biasa ada apa-apa pasti ada pertemuan di kantor kelurahan, mau itu masalah pembangunan dan sebagainya..” (Wawancara dengan HM, 27 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan melakukan rencana pembangunan bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah.

Berdasarkan indikator perencanaan pembangunan infrastruktur Kelurahan Tonrorita sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui wawancara yang dilakukan Bersama Kepala lurah mengatakan bahwa:

“..pastinya kami melakukan rancangan pembangunan berdasarkan pedoman yang sesuai dengan peraturan. Cuma kita tidak ada team yang menangani secara khusus karena kita juga kekurangan tenaga dan orang yang menangani hanya staf desa..” (Wawancara dengan MK, 20 mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan pembangunan kelurahan dilakukan oleh pemerintah kelurahan sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia.

Selanjutnya dilakukan wawancara Bersama masyarakat yakni HM dan SL mengenai penyusunan rencana pembangunan Kelurahan

Tonrorita berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah diatur, dan mengatakan bahwa:

“..kurang taumi juga, apaka sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan atau tidak. Karena saya kurang paham tentang tata caranya itu, tapi pasti pak lurah sudah paham tentang peraturan yang ada..” (Wawancara dengan HM, 27 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada kelurahan tonrorita tidak paham akan adanya pedoman dan ketentuan dalam menetapkan dan merencanakan perencanaan pembangunan jangka menengah. Akan tetapi masyarakat kelurahan tonrorita memberi kepercayaan kepada pemerintah tentang pedoman yang ada.

“..menurutku ia pastinya mereka bekerja sudah sesuai dengan pedoman kerja, mereka pasti ada acuan sehingga membuat kegiatan seperti itu..” (Wawancara dengan SL, 24 mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan kelurahan Tonrorita menurut salah satu tokoh masyarakat pemerintah kelurahan sudah melakukan proses perencanaan pembangunan sudah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ada.

Berdasarkan indikator perencanaan pembangunan, pada peran kepala lurah dalam pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan Tonrorita mengenai program-program prioritas pemerintah Kelurahan Tonrorita dalam proses pembangunan Kelurahan Tonrorita. Melalui wawancara yang dilakukan Bersama kepala kelurahan.

“..ada beberapa program pembangunan di kelurahan ini, seperti pembangunan infrastruktur jalan, yang mana kita lihat sendiri jalanan disini masih banyak yang kurang memadai dan butuh perbaikan..” (Wawancara dengan MK, 20 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki beberapa program pembangunan, akan tetapi pembangunan akses jalan menjadi prioritas karena masih kurangnya dan minimnya jalanan yang ada.

Selanjutnya melalui wawancara yang dilakukan Bersama masyarakat HM dan SL mengatakan bahwa:

“..kurang tau apa saja programnya pemerintah mengenai pembangunan..” (Wawancara dengan HM, 27 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak tau tentang program pemerintah yang ada dikelurahan tonrorita kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

“..setauku yang sekarang itu perbaikan jalan nak karena sedang berusaha pak lurah na perbaiki jalan..” (Wawancara dengan SL, 24 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program pemerintah yang sedang direncanakan adalah perbaikan jalan.

Jadi berdasarkan hasil wawancara pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan kelurahan Tonrorita, pemerintah mengikut sertakan masyarakat baik itu pihak kemaamana dan tokoh masyarakat. Mengenai perencanaan pembangunan menurut aparat kelurahan yang dilakukan pemerintah kelurahan itu sudah memenuhi pedoman RPJM namun beberapa hal

tidak terpenuhi disebabkan kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak paham dengan adanya pedoman perencanaan dalam menetapkan perencanaan pembangunan. Sedangkan saat ini prioritas pembangunan di Kelurahan Tonrorita yakni akses jalan.

Terkait dengan hambatan dan solusi dalam proses perencanaan, pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Hambatan dan solusi Dalam proses perencanaan

No	Hambatan	Solusi
1	Tidak ada tim profesional khusus untuk perencanaan pembangunan infrastruktur	Membentuk tim yang profesional khusus pembangunan infrastruktur
2	Minimnya anggaran dalam pembentukan tim profesional	Pengadaan anggaran khusus dalam membentuk tim profesional
3	Tidak ada warga sarjana Teknik sipil atau profesional di bidangnya di kelurahan Tonrorita	Membentuk tim profesional
4	Minimnya pengetahuan warga yang bertanggung jawab terkait dengan regulasi	Sosialisasi regulasi oleh pemerintah yang terkait
5	Ruang rapat yang sempit tidak memungkinkan untuk mengadakan rapat dengan menghadirkan warga sebanyak-banyaknya	Merekonstruksi aula kelurahan agar lebih luas

2. Pelaksanaan

Pemerintah kelurahan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan kelurahan yang dilaksanakan oleh perangkat lurah. Pembangunan desa/kelurahan yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa/kelurahan. Kerjasama antar kelurahan atau Kerjasama dengan pihak ketiga. Pembangunan kelurahan yang bersumber dari Program

sektor atau program daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini ketentuan diintegrasikan kedalam pembangunan Kelurahan, program dektor atau program daerah di desa/kelurahan dicatat dalam APB desa/kelurahan.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan kepada kepala desa/kelurahan, maka kepada desa/kelurahan mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah kelurahan yang diselenggarakan oleh BPD. kepala lurah mengkordinasikan pelaksanaan program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kelurahan atau unsur masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan indikator diatas Adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan kepada kepala kelurahan, sekretaris lurah dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan program pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala lurah Tonrorita mengenai, proses penetapan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Melalui wawancara yang dilakukan Bersama kepala lurah dan sekretaris lurah.

“..untuk menepatan pelaksanaan dilakukan oleh kepala lurah yang mempertimbangkan beberapa indikator seperti memahami tugas yang akan dilakukan sebagai pelaksana pembangunan, yang biasanya dilakukan dengan orang-orang yang berada di kelurahan, bukan dari luar kelurahan..”

Lebih lanjut sekretaris lurah menyatakan:

“.. dalam pelaksanaan pembangunan program yang telah ditetapkan dalam proses pelaksanaannya ditunjuk orang dari kelurahan untuk lebih memudahkan kami untuk melihat dan mengontrol pembangunan. (Wawancara dengan AM, 29 mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kepala kelurahan berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada. Dan proses penetapan tersebut kepala kelurahan memiliki peran yang sangat besar.

“..pelaksanaan kegiatan pembangunan ditunjuk oleh kepala lurah, biasanya orang-orang yang dapat dipercaya bahkan aparat kelurahan juga agar lebih mudah untuk mengontrol proses pelaksanaan pembangunan..” (wawancara dengan AD, 20 mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan ditunjuk langsung oleh kepala lurah, dimana orang-orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang dapat dipercaya, salah satunya adalah aparat kelurahan agar mudah dalam mengontrol proses pelaksanaan.

Selanjutnya dilakukan wawancara Bersama masyarakat yaitu MH Dan SL mengenai proses penetapan pembangunan

“..saya tidak tau untuk urusan penetapan seperti itu, karena biasanya pak lurah langsung atau memang sudah ada yang sudah ditunjuk dari kantor kelurahan..” (Wawancara dengan SL, 24 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak tau tentang adanya penetapan pelaksanaan pembangunan. Karena pemerintah biasanya menunjuk langsung aparat yang bertugas.

“..tidak tau dan tidak paham juga mengenai proses penetapan pembangunan nak..”(Wawancara dengan HM, 27 mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa proses penetapan pelaksanaan pembangunan dilakukan kepala lurah memiliki peran besar dalam menentukan pelaksanaan pembangunan kelurahan tonrorita. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan rencana pelaksanaan pembangunan pada peran kepala lurah dalam pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan tonrorita mengenai, proses penyusunan rencana kerja pelaksanaan pembangunan dan apa saja yang menjadi fokus pada rencana kerja tersebut, melalui wawancara yang dilakukan Bersama kapala lurah dan sekretaris lurah.

“..dalam kegiatan penyusunan rencana kerja, kami diskusikan apa saja yang akan dikerjakan, biaya yang harus dikeluarkan, lokasi mana saja yang akan dilakukan perbaikan, tenaga kerja yang akan bekerja dalam perbaikan atau pembangunan..” (Wawancara dengan MK, 20 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemerintah kelurahan melakukan rapat yang dimana mendiskusikan apa saja yang akan dilakukan dalam proses perencanaan pelaksanaan, seperi biaya yang akan dikeluarkan, lokasi yang akan mendapat perbaikan jalan, serta tenaga kerja yang akan bekerja dalam proses perbaikan.

“..dalam kegiatan penyusunan rencana kerja kami banyak membahas tata pelaksanaan pembangunan, mulai dari biaya,daftar pelaksanaan kegiatan, tenaga kerja serta tempat tinggal untuk tenaga kerja..” (Wawancara dengan AD,29 mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah kelurahan

Bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, tenaga kerja, serta tempat tinggal untuk tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan kelurahan tonrorita. Dari perencanaan pembangunan yang ada pada RPJM diketahui bahwa pemerintah mempunyai program dalam perbaikan drainase serta gotong royong dalam perbaikan jalan. Sementara untuk pengusulan pada aplikasi SIPD yaitu pengaspalan pada jalan Perbatasan Lauwa-Lingkungan Baturaga dan Pengaspalan Lingkungan parangan-Lingkungan Tompona. Pada pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan pemerintah kelurahan tentunya ia bekerja sama dengan seluruh masyarakat Kelurahan untuk merealisasikan program tersebut. Dimana pada saat pengaspalan Perbatasan Lauwa-Lingkungan Baturaga lurah serta masyarakat ikut terlibat didalamnya. Sesuai wawancara Bersama lurah:

“..Ia saat pengaspalan saya turut ikut memantau pengerjaan jalan, walaupun tidak banyak ikut membantu akan tetapi saya sebagai pemerintah disini setidaknya ikut menyaksikan bahwa pengaspalan/perbaikan jalan di Lingkungan batuborong-baturaga Lingkungan tereleasasikan..” (Wawancara dengan MK, 20 Mei 2023)

Dari wawancara diatas diketahui bahwa selaku kepala lurah ia turut menyaksikan langsung proses pengaspalan pada Lingkungan Batuborong-baturaga

Selanjutnya untuk melihat antusias masyarakat dengan adanya pengaspalan/perbaikan jalan ini, masyarakat sekitar ikut menyaksikan

pengaspalan tersebut. Sesuai wawancara bersama HM dan SL mengatakan bahwa:

“ia saya ikut menyaksikan dan berpartisipasi dalam pengaspalan/perbaikan jalan ini sebab rasa senang saya akhirnya jalanan ini untuk akhirnya di aspal setelah banyaknya janji-janji yang diberikan akhirnya terealisasi sekarang. Dan tentunya masyarakat saya rasa sangat berbahagia dengan pengaspalan ini. Dan setahu saya ada beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam bentuk memberikan sarana tempat tinggal untuk para pekerja..”(Wawancara dengan SL, 24 mei 2023).

Sementara bapak ML mengungkapkan:

“..Alhamdulillah partisipasi kami sebagai masyarakat cukup tinggi. Kalau ada beberapa yang dibutuhkan pemerintah terkait perbaikan jalan ini seperti tenaga ada beberapa memang yang ikut membantu. Ada juga beberapa masyarakat hanya bisa menyaksikan akhirnya di aspal kodong ini jalan, setelah sekian lama dinanti-nanti”.(Wawancara dengan HM, 27 mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan, salah satunya dengan menerima dan mendukung pemerintah kelurahan dan beberapa masyarakat memberi dukungan dengan cara menyediakan tempat tinggal bagi pekerja jalanan. Hal ini juga dibenarkan oleh saudara AD:

“..partisipasi masyarakat terhadap pembangunan alhamdulillah cukup baik sejauh ini, dan ada juga beberapa masyarakat yang bersedia menyediakan tempat tinggal bagi pekerja.” (Wawancara dengan AD, 29 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan cukup baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Lalu pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang direncanakan pemerintah kelurahan yaitu perbaikan saluran air (drainase) dilakukan sejauh 12 kilo yaitu Lingkungan Batuborong sampai Lingkungan Parasangan. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap dimana tahap pertama dilakukan dilingkungan Pa'rasangan dan pengerjaan kedua dilakukan pada lingkungan Baturaga-Batuborong dan ketiga lingkungan Batueja-Tompo'na. Untuk lebih jelasnya perhatikan data berikut:

Tabel 4. Data perbaikan drainase

No	Lingkungan	Jarak	Keterangan	Tahun
1	Lingkungan Pa'rasangan	1 kilometer	Sudah	2022
2	Lingkungan Baturaga-Batuborong	3 kilometer	Sudah	2022
3	Lingkungan batueja-Tompo'na	2,5 kolometer	Sementara diusulkan	2023

Sumber : buku anggaran kelurahan

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa rencana pembangunan jangka menengah dikerjakan secara bertahap oleh pemerintah kelurahan. Dalam pengerjaannya perbaikan drainase ini kelurahan hanya berkoordinasi dengan pihak keluhan serta pekerja yang akan

mengerjakan saluran air (drainase) ini. Sesuai wawancara bersama kepala lurah:

“..Dalam pengerjaan drainase ini kami hanya melibatkan orang-orang yang kerja dikelurahan serta pekerja saja, dan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran kelurahan..” (Wawancara dengan ML, 24 mei 2023)

Dari wawancara diatas ditarik kesimpulan bahwa kepala lurah hanya berkoordinasi dengan staff dan pengerjaana drainase disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah pengerjaan drainase, benar dikerjakan maka saya mewawancarai salah satu staf di kelurahan yaitu kepala administrasi kelurahan.

“..ia untuk mengetahui apakah pengerjaan drainase, benar sesuai perintah pak lurah, pertama yang saya kerja itu drainase lingkungan parasangan dulu sampai selesai sekitar bulan agustus tahun lalu, lanjut pengerjaan drainase kedua itu lingkungan Baturaga-Batuborong. Kalau tidak salah januari ini, sementara untuk tahap ketiga ini belum ada informasinya dari pak lurah kapan dimulai lagi ini pengerjaan. (Wawancara dengan NH, 20 mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas ditarik kesimpulan jika pengerjaan drainase dilakun secara bertahap yang di mulai dari lingkungan pa’rasangan terlebih dahulu dan tahap terakhir dilingkungan Batueja-Tompo’na.

Selanjutnya untuk program gotong royong yang direncanakanelurahan juga berjalan bahaimana mestinya. Gotong royong dilakukan 2 kali dalam sebulan. Ketika akan melakukan kegiatan ini biasanya diumumkandimesjid jika akan diadakan gotongroyong. Gotong royong yang dilakukan pemerintah kelurahan

bersama masyarakat biasanya ditentukan titiknya setiap kali gotongroyong. Sesuai wawancara bersama kepala lurah:

“..biasanya gotongroyong ini ditentukan disatu titik lokasi yang memang jalannya lumayan parah. Kegiatan gotong royong dilakukan masyarakat biasanya menimbun jalan yang berlobang, membersihkan sampah yang ada di drainase. Kegiatan ini juga biasanya dilakukan hari jum’at sebab mengingat masyarakat disini dominan petani, makanya dipilih hari jumat sebab biasanya kalau hari jumat tidak ke kebun. Atau biasa dipilih hari minggu” (Wawancara dengan , MK 20 mei 2023)

Lebih lanjut Sekretaris mengatakan bahwa:

“..Dalam gotongroyong ini masyarakat alhamdulillah antusias dalam perbaikan jalan ini, mereka menyempatkan walau sibuk dengan kerjaan, tapi alhamdulillah ia meluangkan waktunya ketika ada pengumuman akan diadakan gotongroyong bersama pemerintah setempat..” (Wawancara dengan, AD 29 mei 2023)

Dari wawancara di atas ditarik kesimpulan bahwa kegiatan gotongroyong akan diumumkan jika akan dilaksanakan kepada masyarakat. Dalam gotongroyong antusias masyarakat juga cukup tinggi dengan datang ikut bergotongroyong walau sedang sibuk dengan kegiatan taninya. Sesuai wawancara Bersama bapak SL:

“..“ia kami sebagai masyarakat ikut bergotongroyong dalam kegiatan pelaksanaan perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah setempat, biasanya kami masyarakat membersihkan drainase, menimbun jalan berlubang, atau jika ada longsor kami bersama-sama mebersihkan jalan yang ditimbuni tanah longsor, apalagi ini jalan untuk penghubung. Kegiatan gotongroyong biasanya dilakukan hari jumat atau minggu dengan lokasi titik yang sudah ditentukan..” (Wawancara dengan, SL 24 mei 2023)

Dari wawancara diatas dilihat bahwa masyarakat antusias dala mengikuti gotongroyong Bersama pemerintah setempat.

Jadi berdasarkan hasil wawancara pada indikator pelaksanaan peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan tonrorita dalam proses pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kepala desa/kelurahan berdasarkan pedoman yang berlaku dan pada proses penetapan kepala desa/kelurahan memiliki peran yang sangat besar, Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksanaan pembangunan karena tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan pemerintah bersama pelaksana Menyusun kegiatan kerja yang akan dilakukan baik itu lokasi, pembiayaan, tenaga kerja serta tempat tinggal untuk pekerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan kelurahan tonrorita.

Namun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan terkait rencana kerja pembangunan yang ada di Kelurahan Tonrorita. Sedangkan untuk melakukan pengadaan tenaga kerja adalah orang yang memang sudah ahli dalam infrastruktur jalan dan juga sumberdaya manusia desa/kelurahan dilibatkan untuk membantu pembangunan dan untuk masyarakat yang tidak paham dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaan. Serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan kelurahan baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan.

Terkait dengan hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan, dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel 4.7 Hambatan dan solusi Dalam Proses Pelaksanaan

No	Hambatan	Solusi
1	Minim sumber daya manusia yang akan didelegasikan menjadi pelaksana	Agar melibatkan partisipasi masyarakat. Regulasi bisa diubah.
2	Tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan	Melibatkan masyarakat
3	Masyarakat tidak ingin terlibat dalam pelaksanaan	Melakukan pemahaman ke masyarakat.
4	Pemenang tender kesulitan mendapatkan rumah yang akan ditempati oleh tenaga kerja di sekitar lokasi pelaksanaan	Memberi pemahaman ke warga agar kooperatif dan membantu pemenang tender
5	Dalam pelaksanaannya, faktor alam seperti hujan memnghambat proses pengerjaan	Waktu pelaksanaan mesti mempertimbangkan cuaca
6	Kondisi tanah di sekitar lokasi pelaksanaan kurang keras, sehingga pengerjaan kurang efisien	Waktu pelaksanaan mesti mempertimbangkan cuaca
7	Lokasi pelaksanaan juga melewati tempat keramaian seperti pasar, sehingga membuat pelaksanaan agak terhambat	Mengambil jalur alternatif agar pelaksanaan tidak terhambat

3. Pengawasan

Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa/Kabupaten melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam upaya pemberdayaan dilakukan melalui pengawasan serta Pemantauan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan kelurahan yang dilakukan secara partisipasi oleh masyarakat. Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kelurahan.

Hasil pengawasan pembangunan desa/kelurahan menjadi dasar pembahasan musyawarah kelurahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Pengawasan dan Pemantauan terhadap perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM desa/kelurahan dan RKP desa/kelurahan. Pengawasan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai pengadaan barang atau jasa, pengadaan bahan/materi, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan atau material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

Dengan indikator diatas Adapun beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yakni, kepala lurah, sekretaris lurah dan tokoh masyarakat dari kelurahan Tonrorita.

Berdasarkan indikator pengawasan pembangun kelurahan, pada peran kepala lurah dalam pembangunan infrastruktur jalan kelurahan tonrorita mengenai, seperti apa pemerintah dalam melakukan pengawasan pada pembangunan infrastruktur jalan dikelurahan tonrorita. Melalui wawancara bersama kepala lurah dan sekretaris lurah mengatakan bahwa:

“..kita mengontrol dan mengawasi langsung pembangunan, turun kelapangan bersama pekerja untuk mengecek berapa tingkat kemajuan, penyelesaian, memeriksa biaya dan lain sebagainya..”
namun yang perlu adek ketahui bahwa kalau pengaspalan/perbaikan

jalan tidak masuk didana kelurahan tapi bagian PU, dan memang pengawasnya dari pihak lingkungan setempat, dalam hal ini h.Yasin dan staf kelurahan” (Wawancara dengan MK, 20 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengawasi langsung proses pembangunan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengecek tingkat kemajuan , penyelesai dan memeriksa biaya yang digunakan. walau kita tahu bahwa biaya pengaspalan/perbaikan jalan itu bukan bagian dari biaya kelurahan namun bagian dari PU.

“..pemerintah melakukan pengawasan dan pemantauan secukupnya karena juga sudah ada laporan yang masuk..” (Wawancara dengan AD, 29 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada proses pembangunan dilakukan pemantauan secukupnya karena dalam dalam proses pembangunan telah ada petugas yang ditugaskan untuk memantau dan bertanggung jawab pada proses pembangunan.

Selanjutnya wawancara Bersama pengawas lingkungan :

“..Sebagai pengawas saya ikut terlibat dalam pembangunan jalan, ini dengan mengawasi, mengontrol proses sampai mana. Pengaspalan ini dari lingkungan batuborong-lingkungan baturaga sepanjang 2,1 kilometer yang terealisasi pada tahun 2022, dan masih tersisa beberapa kilometer, menurut informasi yang saya dapat memang perencanaannya 10 kilometer, tapi hanya mendapat jatah 2,1 Kilometer tahun ini. Dalam pengaspalan ini saya juga melibatkan masyarakat setempat untuk dipekerjakan dalam pengerjaan bagian cor pinggir jalannya” (Wawancara dengan NH, 20 mei 2023).

Selanjutnya wawancara Bersama masyarakat yaitu HM dan SL mengatakan bahwa:

“..kurang tau nak, karena biasanya kalau saya lewat yang kulihat hanya pekerja jalan dan beberapa masyarakat yang biasa membantu juga..” (Wawancara dengan HM, 27 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembangunan jalan pemerintah kurang terlibat dalam proses pengawasan.

“..pemerintah juga melakukan pengawasan Cuma kurang karena pekerja masih sering lepas tanpa pengawasan jadi pembangunan biasanya agak lambat..” (Wawancara dengan SL, 24 mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merasa sudah melakukan pengawasan dengan baik. Lain halnya dengan masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah masih kurang dalam memberikan pengawasan tersebut.

Berdasarkan indikator pengawasan pembangunan pada peran pembangunan kepala lurah dalam pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan tonrorita mengenai, partisipasi masyarakat kelurahan tonrorita dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan kelurahan tonrorita. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama kepala lurah dan sekretaris mengatakan bahwa:

“..kalau partisipasi masyarakat dalam pengawasan itu masih kurang, karena mereka beranggapan sudah ada yang pemerintah yang mengontrol dan mengawasi jadi mereka meras sudah tidak perlu ada pengawasan..” (Wawancara dengan MK, 20 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan masih kurang. Karena beranggapan pemerintah sudah ikut serta dalam proses pengawan tersebut.

“..partisipasi masyarakat dalam pengawasan itu masih kurang..” (Wawancara dengan AD, 29 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan, menurut pemerintah partisipasi masyarakat masih kurang, karena masyarakat mengandalkan pemerintah dalam hal pengawasan.

Selanjutnya dilakukan wawancara Bersama HM dan SL yang mengatakan bahwa:

“..saya kurang memperhatikan karena pekerjaan saya Bertani dari pagi dan siang hari, yang kadang-kadang sampai sore..” (Wawancara dengan SL, 24 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurangnya berpartisipasi dalam proses pengawasan karena sibuknya dalam bertani yang dilakukan pada pagi, siang sampai sore hari.

“..tidak sempatma untuk mengawasi karena ada kesibukan masing-masing, apalagi siang hari sudah sibuk dikebun..” (Wawancara dengan HM, 27 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pengawasan pembangunan dikarenakan kesibukannya dalam bertani.

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator pengawasan pada peran kepala kelurahan tonrorita. Mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah, pemerintah merasa sudah melakukan pengawasan dengan baik. Lain halnya dengan masyarakat

yang beranggapan bahwa pemerintah masih kurang dalam memberikan pengawasan tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan menurut pemerintah kelurahan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang baik itu dikarenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan pada pembangunan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kesibukan yang dimiliki masyarakat yaitu Bertani sehingga tidak bisa memperhatikan secara detail pengawasan jalan tersebut.

Terkait dengan hambatan dan solusi dalam proses pengawasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8 Hambatan dan solusi Dalam Proses Pengawasan

No	Hambatan	Solusi
1	masyarakat kurang percaya diri	Memberi pemahaman ke masyarakat
2	Masyarakat sungkan untuk menjadi pengawas, karena merasa hanya masyarakat kecil.	Pemerintah melakukan pemahaman ke masyarakat.
3	Kegiatan dalam kelurahan yang bertepatan dengan pelaksanaan pengaspalan, membuat pengawasan kurang intens.	Mengamanahkan ke pegawai atau masyarakat yang tidak memiliki kesibukan.
4	Kesibukan masyarakat dengan pekerjaannya masing-masing juga membuat masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan pengawasan secara aktif	Mengamanah ke masyarakat yang tidak memiliki kesibukan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pengaspalan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Muslimin Kadir, SE terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan. Dalam tiga

tahun terakhir pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Biringbulu kelurahan Tonrorita hanya satu kali pembangunan yakni pada tahun 2022 dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 23.273.711.195,00.

Anggaran tersebut terbagi atas enam ruas jalan yakni:

1. Pengaspalan Jalan Pencong - Lembangloe
2. Pengaspalan Jalan Batumentang - Sanrangan
3. Pengaspalan Jalan Tonrorita - Tauwa
4. Pengaspalan Jalan Pencong - Pakkoloe
5. Pengaspalan Jalan Pencong - Erebang Desa Pancong
6. Pengaspalan Jalan Desa Batuma'lonro.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka hasil penelitian diatas akan di bahas lebih lanjut dalam bentuk uraian

1. Perencanaan

Perencanaan yang dimiliki kelurahan Tonrorita melakukan kordinasi pendampingan diwilayahnya. Pembangunan kelurahan mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah Kelurahan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, pembinaan kemasyarakatan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Adapun rencana atau agenda dari kepala lurah Tonrorita sendiri selama masa jabatannya pembangunan infrastruktur jalanan merupakan program prioritas kelurahan tersebut dikarenakan sangat minimnya fasilitas jalanan yang ada di Kelurahan

Tonrorita sendiri. Perencanaan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengusulkan rencana pembangunan jalan sejauh 10 kilometer pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan (SPID) sedangkan pada Rencana Pembangunan Dalam Jangka menengah dengan merencanakan perbaikan saluran air (drainase). Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi Sarah Simbolon, dkk (2021) bahwa perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apapun kegiatannya, tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan kecil atau besar guna perbaikan infrastruktur. Negara merupakan organisasi sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau atau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan kepada kepala desa/kelurahan Tonrorita, maka kepada desa/kelurahan mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah kelurahan yang diselenggarakan oleh BPD. Kepala lurah mengkordinasikan pelaksanaan program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kelurahan atau unsur masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah kelurahan Bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, tenaga kerja, serta tempat tinggal untuk pekerja yang digunakan pada

kegiatan pembangunan kelurahan Tonrorita. Kegiatan pelaksanaan pembangunan sendiri sudah terealisasi meski belum sepenuhnya. Terealisasinya pembangunan jalan 2,1 kilometer di lingkungan Batuborong-Baturaga, pengerjaan drainase tahap 1 lingkungan parasangan, dan tahap 2. Lingkungan batueja-lingkungan Tompo'na. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiestra dalam Janice, (2014) bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

3. Pengawasan

Pengawasan terhadap perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM desa/kelurahan dan RKP desa/kelurahan Tonrorita. Pengawasan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai pengadaan barang atau jasa, pengadaan bahan/materi, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengirim bahan atau material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Seperti pemerintah di kelurahan Tonrorita mengawasi langsung proses pembangunan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengecek tingkat kemajuan, penyelesaian dan memeriksa biaya yang digunakan. Serta sudah adanya yang bertugas dalam mengawasi pembangunan jalan yaitu kepala lingkungan setempat, sehingga

pengawasan barang, material dan pembayaran upah terkontrol dan sistematis. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang dalam Dewi Sarah Simbolon, dkk (2021) bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dapat disimpulkan bahwa:

Pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan pemerintah ikut melibatkan masyarakat baik dari pihak keamanan dan tokoh masyarakat. Mengenai perencanaan pembangunan menurut aparat kelurahan yang dilakukan pemerintah sudah memenuhi pedoman RPJM, akan tetapi beberapa hal tidak terpenuhi dikarenakan kurangnya SDM. Namun masyarakat masih kurang paham akan adanya pedoman dalam proses perencanaan pembangunan.

Pada indikator pelaksanaan pemerintah kepala lurah memiliki peran penting dalam proses penetapan pelaksanaan. Namun masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksanaan pembangunan karena tidak dilibatkan dalam proses tersebut dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaan. Dalam rencana kerja pelaksanaan pemerintah Bersama pelaksana Menyusun kegiatan kerja yang akan dilakukan pada kegiatan pembangunan kelurahan tonrorita. Sedangkan untuk pengadaan tenaga kerja adalah orang yang memang sudah ahli dalam infrastruktur jalan.

Pada indikator pengawasan, pemerintah merasa sudah melakukan pengawasan yang cukup baik. Lain halnya dengan masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah masih kurang memberikan pengawasan. Sedangkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan masih kurang baik dikarenakan kesibukan yang dimiliki masyarakat dalam bertani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan maka saran yang diberikan selaku penulis dan sekaligus peneliti yaitu:

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini kelurahan diharapkan untuk ikut melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih memperhatikan dan ikut berperan aktif pada proses pengawasan pembangunan infrastruktur jalan

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, K., & Tepare, O. A. (2017). *Peran pemerintah pembangunan infrastruktur jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(1), 32.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino Leo, (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Haris, Abdul. (2005). *Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi*.
- Janice, A. (2014). *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*. *Ilmu Pemerintahan*, 3.
- Kessa dan wahyudin, 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*
- Kuncoro, M. (2011). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Pramana, Gilang. (2013). *Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara*. *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, Nomor 1.
- Purwadarminta, W.J.S. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rohman, S. (2017). *KOORDINASI CAMAT DENGAN KEPALA DESA*. 5(1), 437–447.
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda*. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 3(2), 834.
- Sedarmayanti, (2003). *Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.

Soewignjo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Soekanto Soerjono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali pers.

S.P Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan ; Konsep, Dimensi dan Starateginya*, Bumi Aksara, Jakarta

Suryono. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang, UM. Press

Sugiyono, 2005, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” Alfabeta, Bandung

Suryono, Agus. (2010). *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang : UB Press.

Tjokroadmidjojo, Bintoro. (198). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Regulasi Undang-Undang

Undang-Undang No 25 Tahun 2005

Undang-Undang No 114 Tahun 2014

LAMPIRAN

Lampiran 1:

DOKUMENTASI



Kantor kelurahan tonrorita



Wawancara yang dilakukan dengan sekretaris lurah tonrorita



Wawancara yang dilakukan dengan Kepala lurah tonrorita



Wawancara yang dilakukan dengan staf (tenaga administrasi)

kelurahan tonrorita



Wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat



Wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat



Keadaan jalan kelurahan tonrorita



Keadaan jalan kelurahan tonrorita



Keadaan jalan kelurahan tonrorita



Keadaan jalan kelurahan tonrorita



BERANDA

CARI PAKET

REGULASI

KONTEN KHUSUS

DAFTAR HITAM

AMEL

KONTAK KAMI

PENDAFTARAN PENYEDIA

LOGIN

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan	Semua	Tahun Anggaran	Semua
Nama K/L/PD	Semua	Pemenang Berkontrak	Nama Pemenang Berkontrak
Status Kontrak	Semua	Kontrak	Semua





Tampilan 25 data

Cari:

Kode	Nama Paket	K/L/PD	Tahapan	HPS
4120644	Paket-13 (Tiga belas) Kegiatan Pembangunan Jalan (PEN) terdiri dari 6 (enam) ruas jalan di Kecamatan Biringbulu yaitu : 1).Pengaspalan Jalan Pencong - Lembangloe, 2).Pengaspalan Jalan Batumentang - Sarangan, 3).Pengaspalan Jalan Tonrorita - Tauwa, 4).Pengaspalan Jalan Pencong - Pakkoloe, 5). Pengaspalan Jalan Pencong - Erebang Desa Pencong, 6). Pengaspalan Jalan Desa Batumalono. spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 23.077.000.000,00	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Sudah Selesai	23,3 M
3020644	Paket III (DAK) Pemeliharaan Berkala Lauwa/Batuborong Tonrorita Kec.Biringbulu (No.Ruas.14) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.941.300.000,00	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Sudah Selesai	3 M
2189644	belanja modal kontainer sampah tonrorita spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Sudah Selesai	210 Jt
1588644	Paket IX. Peningkatan Jalan Tonrorita - Patao Kec.Biringbulu (No.Ruas 059) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 11.833.217.359,00	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Sudah Selesai	11,9 M
1581644	Paket V. Peningkatan Jalan Ruas Tonrorita Pencong Kec. Biringbulu (No.Ruas 023) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 10.952.051.034,00	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Sudah Selesai	11,1 M
1275644	Paket XIII (Pemeliharaan Ruas Jalan Poros Kōmāra - Batuma'lonro - Baturappe (Lanjutan) Kec.Biringbulu, Pemeliharaan Ruas Jalan Poros Parangloe - Taring Kec.Biringbulu, Pemeliharaan Ruas Jalan Poros Lauwa/Batuborong - Tonrorita Kec.Biringbulu, Peningkatan Jalan Ruas Jalan Parangkeke - Borrongangka Kel Cikoro Kec.Tompobulu, Peningkatan Jalan Ruas Jalan Butoa - Lantantanga Desa Rappotemba Kec.Tompobulu, Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Parangbintoto Desa Cikoro Kec.Tompobulu, Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Batupaewai - Kadangloe Desa Taniete (Lanjutan) Kec.Tompobulu) Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Batal	23,2 M
1181644	Pembangunan Puskesmas Tonrorita spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Sudah Selesai	1 M
1152644	Pembangunan Puskesmas Tonrorita Tender Gagal Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Gagal	1 M
1122644	Pembangunan Puskesmas Tonrorita Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Gagal	1 M
323644	Pengadaan jaringan pipa air bersih dsn. Tompona desa Tonrorita spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Sudah Selesai	362,5 Jt
88644	Rehab. Kantor Desa Tonrorita spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 228.891.000,00	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Tender Sudah Selesai	230 Jt

Tampilan 1 sampai 11 dari 11 data (disaring dari 1,751 entri keseluruhan)

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file




lpse.gowakab.go.id/eproc4/lelang/4120644/pen



Informasi Tender							
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak							
Kode Tender	4120644						
Nama Tender	Paket-13 (Tiga belas) Kegiatan Pembangunan Jalan (PEN) terdiri dari 6 (enam) ruas jalan di Kecamatan Biringbulu yaitu : 1).Pengaspalan Jalan Pencong - Lembangloe, 2).Pengaspalan Jalan Batumentang - Sanrangan, 3).Pengaspalan Jalan Tonrorita - Tauwa, 4).Pengaspalan Jalan Pencong - Pakkoloe, 5). Pengaspalan Jalan Pencong - Erebbang Desa Pencong, 6).Pengaspalan Jalan Desa Batumalonro.						
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana				
	35670782	Paket-13 (Tiga belas) Kegiatan Pembangunan Jalan (PEN) terdiri dari 6 (enam) ruas jalan di Kecamatan Biringbulu yaitu : 1).Pengaspalan Jalan Pencong - Lembangloe, 2).Pengaspalan Jalan Batumentang - Sanrangan, 3).Pengaspalan Jalan Tonrorita - Tauwa, 4).Pengaspalan Jalan Pencong - Pakkoloe, 5). Pengaspalan Jalan Pencong - Erebbang Desa Pencong, 6).Pengaspalan Jalan Desa Batumalonro.	APBD				
Tanggal Pembuatan	16 Juli 2022						
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai						
K/L/PD	Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa						
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi						
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur						
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction						
Tahun Anggaran	APBD 2022						
Nilai Pagu Paket	Rp. 23.273.711.195,00	Nilai HPS Paket	Rp. 23.270.000.000,00				
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan						
Lokasi Pekerjaan	• Kecamatan Biringbulu - Gowa (Kab.)						
Kualifikasi Usaha	Menengah						
Syarat Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <p>Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.</p> <table border="1"> <tr> <td>Jenis Izin</td> <td>Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi</td> </tr> <tr> <td>Perizinan Usaha</td> <td>Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku</td> </tr> </table> <p>1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi
</p> <p>3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) atau Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001 - PermenPU No. 6 Tahun 2021) Kode KBLI 2020 = 42101 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
</p> <p>7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)</p> <p>8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Lain</p> <p>Memiliki NPWP Peserta, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Lain</p> <p>Memiliki Kemampuan Dasar KD dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir pada Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya kecuali Jalan Layang, Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara SI003 atau Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan BS001 - PermenPU No. 6 Tahun 2021 Kode KBLI 2020 42101</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Lain</p> <p>Nilai Kemampuan Paket KP ditentukan sebanyak 6 enam atau 1,2 satu koma dua jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 lima tahun terakhir</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Lain</p> <p>Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak</p>			Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	Perizinan Usaha	Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku
Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi						
Perizinan Usaha	Bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku						
Peserta Tender	10 peserta						

Data pembangunan infrastruktur jalan dalam tiga tahun terakhir

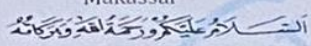
Lampiran 2:

PERSURATAN


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1459/05/C.4-VIII/V/1444/2023 20 Syawal 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 10 May 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0643/FSP/A.6-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 9 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : **EVY SRIWATI**
 No. Stambuk : **10561 1128119**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**


Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN TONRORITA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Mei 2023 s/d 13 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

DOKUMENTASI

05-23

Lampiran 2:



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 16463/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1459/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: EVY SRIWATI
Nomor Pokok	: 105611128119
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI
KELURAHAN TONRORITA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Mei s/d 15 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 16463/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20230512834692



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Website: dpmpstp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/572/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
 KANTOR KELURAHAN TONRORITA
 KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN
 GOWA

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 16463/S.01/PTSP/2023 tanggal \$(izin_tgl_permohonan) tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **EVY SRIWATI**
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 19 September 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 105611128119
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Parasangan

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN TONRORITA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA"

Selama : 15 Mei 2023 s/d 15 Juni 2023
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
 Pada Tanggal : 15 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. KETUA LP3M UNISMUH MAKASSAR DI MAKASSAR
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI/819/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BIRINGBULU
KELURAHAN TONRORITA**

Alamat : Jln. Poros Tonrorita Lingkungan Pa'rasangan Kel. Tonrorita Kec. Biringbulu Kab. Gowa

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 143/SIP/KL-T/VI/2023

Dasar : Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Gowa Nomor: 503/301/DPM-PTSP-PENELITIAN/III/2023 Tanggal 20 Mei 2023 Rekomendasi Penelitian Maka Kepala Kantor Lurah Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : Evy Swriwati
Nim/Jurusan : 105611128119/Ilmu Administrasi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Pa'rasangan

Untuk

: Mengadakan penelitian di Kantor Lurah Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowadalam Rangka Penyusunan Skripsi UNISMUH di Makassar dengan Judul Penelitian :

**"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI
KELURAHAN TONRORITA KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA"**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Harus Melapor pada Kepala Kantor Lurah Tonrorita
2. Tidak Mengganggu proses kegiatan kerja di Kantor yang bersangkutan
3. Harus mematuhi tata tertib dan peraturan dikantor yang berlaku
4. Kepada yang bersangkutan wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian Surat Izin Penelitian Ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : Tonrorita
Tanggal : 5 Juni 2023





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Evy Sriwati
NIM : 105611128118
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, NIP. 19630101198001001
NBM. 963501



Evy sriwati 105611128118 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.its.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	www.kompasiana.com Internet Source	2%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
6	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Evy sriwati 105611128118 Bab II

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	catatanpamong.blogspot.com Internet Source	2%
2	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
3	www.ri.go.id Internet Source	2%
4	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	2%
5	www.ilmuips.my.id Internet Source	2%
6	jom.unri.ac.id Internet Source	2%
7	yunusluat.blogspot.com Internet Source	2%
8	alwihandianto.blogspot.com Internet Source	2%
9	duniaguawkwk.blogspot.com Internet Source	2%

- | | | |
|----|--|----|
| 10 | Submitted to Universitas Wiraraja
Student Paper | 2% |
| 11 | Submitted to Northwest Missouri State
University
Student Paper | 2% |
| 12 | repository.uki.ac.id
Internet Source | 2% |
| 13 | repository.unmuhjember.ac.id
Internet Source | 2% |

Exclude quotes

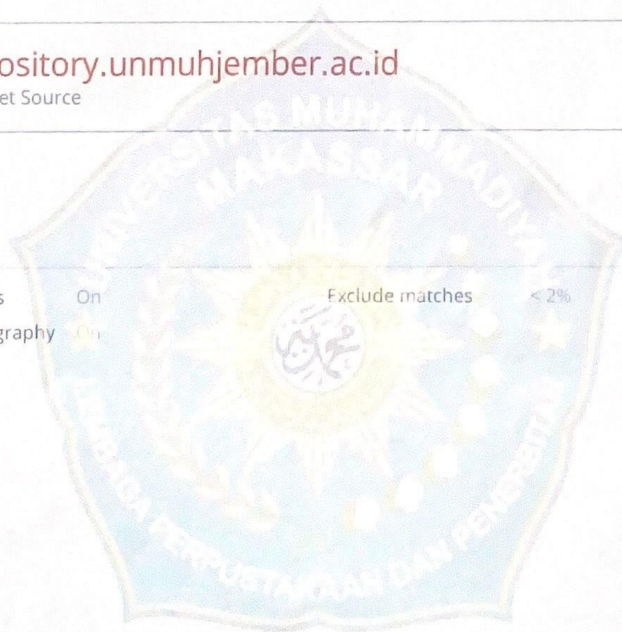
On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Evy sriwati 105611128118 Bab III

ORIGINALITY REPORT

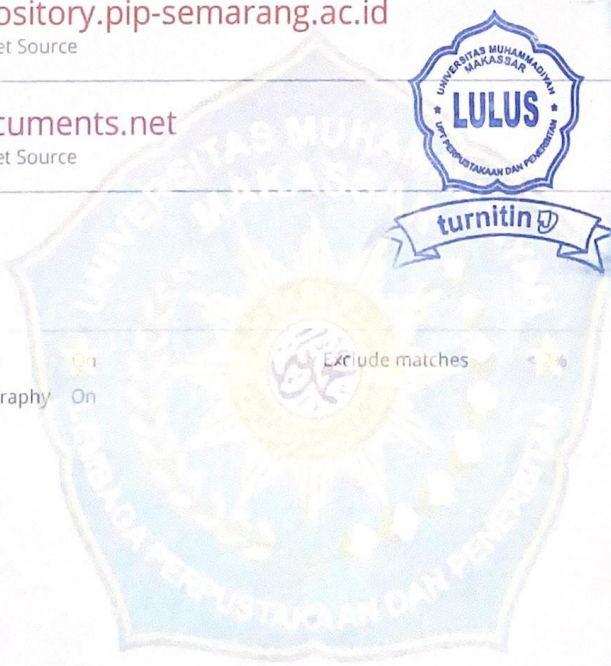
7 %	7 %	5 %	5 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.pip-semarang.ac.id Internet Source	5 %
2	fdocuments.net Internet Source	2 %



Exclude quotes On Exclude matches < 5%
Exclude bibliography On



Evy sriwati 105611128118 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7 %	7 %	2 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3 %
2	www.slideshare.net Internet Source	2 %
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Evy sriwati 105611128118 Bab V

ORIGINALITY REPORT

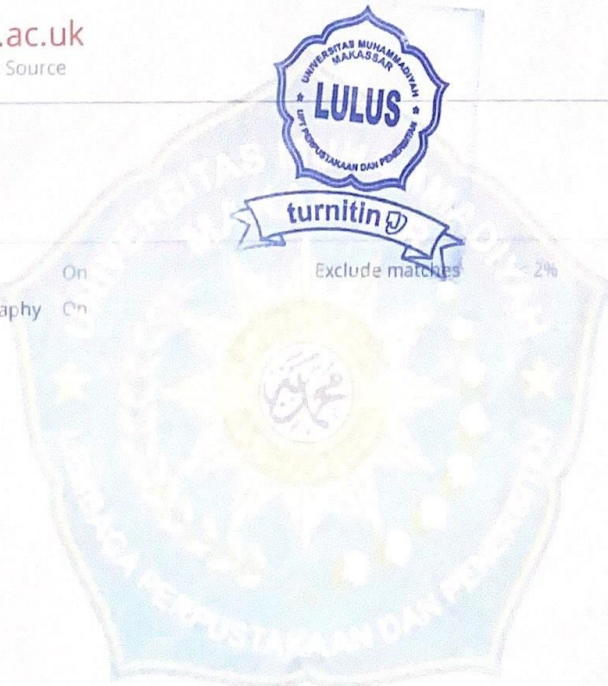
3% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 core.ac.uk Internet Source	3%
--	-----------

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BIOGRAFI PENULIS



EVY SRIWATI, Lahir di Makassar pada Tanggal 19 september 2001. Merupakan anak kedua dari 2 bersaudara buah hati dari Bapak H. Musa dan Ibu Hj.Rostina S.Pd Penulis menghabiskan tiga belas tahun pendidikannya di Kabupaten Gowa, Mulai dari pendidikannya di Bangku TK Al-Mubarak di Tahun 2006 sampai 2007, lanjut masuk SDN Tonrorita dan lulus pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTSS Bahrul Ulum dan lulus pada tahun 2016, lanjut di Madrasah Aliyah Bahrul Ulum dan lulus pada tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara hingga selesai pada tahun 2023.